



SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI

RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2019-2023

VISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI 2018-2023
"MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN
JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA
DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA"

"Misi ke 1"

"Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi"

Tujuan

Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ASISTEN PEMERINTAHAN SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan efektifitas tata
kelola penyelenggaraan bidang
pemerintahan, humas, hukum dan
kerjasama

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan efektifitas tata
kelola penyelenggaraan
pemerintahan daerah bidang
administrasi umum,
kelembagaan dan pelayanan
publik

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan efektifitas tata
kelola penyelenggaraan
bidang ekonomi,
administrasi pembangunan
dan kesra

**Sekretariat
Daerah Kota
Jambi**



**CASCADING
RPJMD KE RENSTRA**

**MISI 1 PENGUATAN BIROKRASI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

TUJUAN

Terwujudnya Optimalisasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

**INDIKATOR
TUJUAN**

Prestasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

SASARAN

Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan bidang pemerintahan, humas, hukum dan kerjasama

Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan bidang ekonomi, administrasi pembangunan dan kesra

Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang administrasi umum, kelembagaan dan pelayanan publik

**INDIKATOR
SASARAN**

1. Prestasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Persentase perjanjian kerjasama yang diimplementasikan

Komponen Standarisasi UKPBJ

Rata – Rata Indeks Kepuasan Masyarakat

STRATEGI

Penyelenggaraan Koordinasi , pengawasan dan pengendalian kegiatan pada lingkup sekretariat Daerah

Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah

Optimalisasi kinerja pegawai dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur

**ARAH
KEBIJAKAN**

Meningkatnya Tertib administrasi selaku penyelenggara pemerintahan umum yang baik dan bersih

Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah yang tertata sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur

**PROGRAM
2019**

1. Program Pemberdayaan Kecamatan dan kelurahan

2. Program peningkatan kerjasama daerah

3. Program penataan Peraturan perundang – undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah

4. Program Optimalisasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan , pembangunan dan pemanfaatan teknologi Informasi

5. Program peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan

6. Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik

7. Program Pembinaan dan Fasilitas bagi Organisasi dan Kegiatan Keagamaan

8. Program Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan

9. Program Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan Setda dan kerumahtanggaan

10. Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

**PROGRAM
2020-2023**

1. Program Penataan administrasi pemerintahan dan kewilayahan	5. Program peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan	9. Program Tata Kelola Organisasi dan ketatalaksanaan
2. Program peningkatan kerjasama daerah	6. Program Fasilitas dan koordinasi kelembagaan keagamaan	10. Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan Setda dan kerumahtanggaan
3. Program penataan Peraturan perundang – undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah	7. Program Peningkatan koordinasi, fasilitas dan monitoring bidang perekonomian	
4. Program Penyebarluasan informasi penyelenggaraan , pemerintah daerah	8. Program Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	

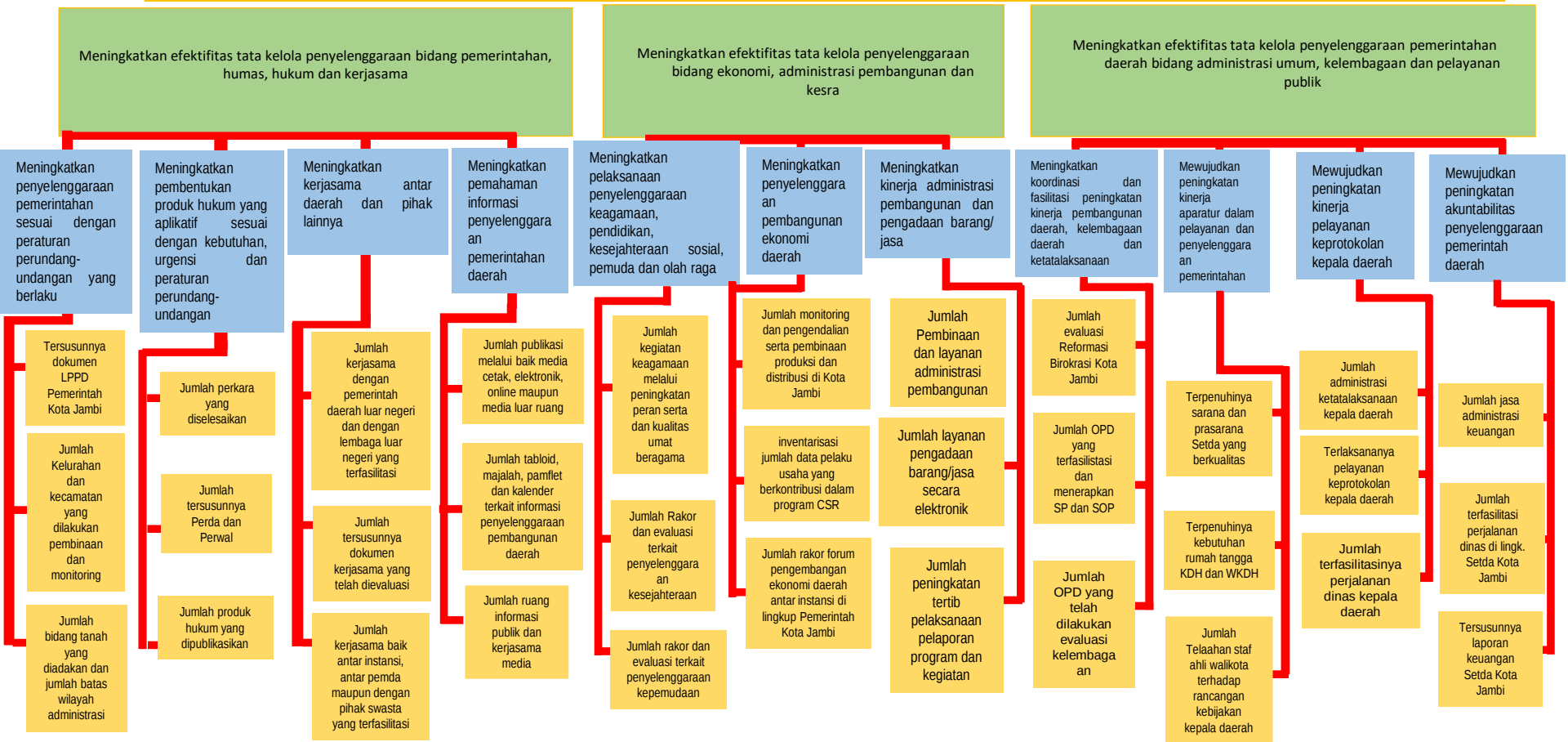
**INDIKATOR
PROGRAM**

1. 1. Ketepatan waktu penyampaian LPPD	1.2. Persentase ketersediaan lahan tanah untuk pelayanan masyarakat	1.3. Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	5.1. Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	5.2. Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	9. 1. Rata-rata indeks pelayanan publik	9.2. Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku
2.1. Persentase fasilitas kerjasama antar daerah dan pihak lainnya	2.2. Persentase kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti		6. Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan		9.3. Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	
3.1. Persentase rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan	3.2. Persentase penyelesaian perkara		7. Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan monitoring bidang perekonomian		10. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor sekretariat daerah	
4. Persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah			8.1. Persentase kinerja kelembagaan pengadaan	8.2. Persentase tertib administrasi pembangunan		

**INDIKATOR
KEGIATAN**

Tersusunnya dokumen LPPD Pemerintah Kota Jambi	-Jumlah bidang tanah diadakan - Tertatanya batas wilayah administrasi	-Terwujudnya kecamatan berkinerja baik - Terwujudnya pembinaan dan monitoring administrasi pemerintah kelurahan	Jumlah kegiatan keprotokolan baik KDH, WKDH, Sekda, Asisten maupun Staf Ahli	Jumlah perjalanan dinas baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri	Jumlah perangkat daerah yang telah terfasilitasi dan menerapkan SP dan SOP	Jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan evaluasi kelembagaan
Terlaksananya kegiatan fasilitasi kerjasama Pemerintah Kota baik dalam negeri maupun luar negeri		Jumlah dokumen kerjasama	-Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, rakor, penilaian dan evaluasi penyelenggaraan baik kesejahteraan maupun kepemudaan		- Tersedianya pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	- Tersedianya kebutuhan rumah tangga KDH dan WKDH
Jumlah penyusunan perda dan perwal		Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah pelaksanaan rakor, sosialisasi dan monev baik pada kegiatan CSR, BUD, sarana dan prasarana ekonomi maupun kegiatan produksi dan distribusi			
Jumlah publikasi media baik media cetak, elektronik, online maupun luar ruang			Jumlah laporan hasil evaluasi program dan kegiatan OPD	Jumlah pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik		

TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH





Terima Kasih